

Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat

Arum Tri Utami¹

Abstrak

Artikel ini memberikan informasi mengenai kebebasan dan hak pilih khususnya tentang kebebasan dan hak pilih wanita. Hak pilih adalah sesuatu yang diberikan kepada orang untuk memilih kepala negaranya. Hak pilih wanita di Amerika Serikat telah melewati perkembangan sejarah yang panjang, diperlukan adanya sebuah pergerakan sosial agar wanita dapat memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di negara tersebut. Pada awal mula pemilihan di Amerika Serikat, hak pilih diberikan kepada lelaki berkulit putih yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Pendiri negara tersebut berpikir bahwa hak pilih seharusnya diberikan kepada mereka yang dapat memimpin dirinya sendiri, wanita tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut. Pergerakan ini membawa sebuah perubahan pada pemerintahan di Amerika Serikat. Amandemen ke sembilan belas menyatakan bahwa wanita memiliki hak pilihnya dalam pemilihan di Amerika Serikat.

Kata-kata Kunci : Hak pilih wanita, sejarah pergerakan, demokrasi liberal, pemilihan umum, dan Amerika Serikat

Abstract

The aim of this article is to give an information about freedom and suffrage especially about woman freedom and suffrage. Suffrage is something that is given to the people to vote for their leader of the state. Woman suffrage in United State America have been through a long history, where a social movement for women's suffrage in elections in the United States was required. At the begining of the election history in the United States the right to vote was given to the white men who have abundant wealth. The founders of the state assume that voting right should be given to those who can lead theirselves, and women were excluded from that criteria. This movement resulted in the change of the Government of the United States. The nineteenth amendment to the constitution states that women have the right to vote in elections.

Keywords: woman suffrage, history movement, demokrasi liberal, pemilihan umum, United State of America

¹ Penulis adalah alumni Jurusan HI Universitas Jenderal Soedirman. Email: arumtriotami@gmail.com

Pendahuluan

Wanita pada era modern sekarang ini menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam hubungan internasional, salah satu kajian hubungan internasional yaitu feminisme membahas mengenai wanita pada khususnya. Sejarah panjang juga mewarnai perkembangan wanita dalam menyetarakan haknya di bidang politik. Banyak negara di dunia ini yang memiliki pemimpin wanita. Indonesia contohnya pernah dipimpin oleh presiden wanita, Megawati Soekarno Putri. Shong Ching Ling presiden Republik Rakyat Cina. Selain menjadi pemimpin negara, wanita sekarang ini juga menempati banyak kursi penting di pemerintahan. Perjuangan perempuan terjadi hampir di setiap negara di dunia untuk mendapat pengakuan yang sama dengan laki – laki. Hampir kebanyakan memiliki latar belakang yang sama dalam kepercayaan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan hanya dapat bekerja di dapur dan mengurus anak.

Seiring perkembangan jaman, dan perempuan – perempuan di dunia mendapat pendidikan yang sama dengan laki – laki mereka mulai menuntut adanya kesetaraan dalam segala sendi kehidupan. Baik kehidupan sosial maupun politik. Hal ini yang menjadi banyak pergerakan di dunia yang mengatas namakan kesejajaran antara laki – laki dan perempuan. Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara paling demokratis di dunia, juga tidak terlepas dari sejarah panjang perempuan untuk mendapatkan haknya di bidang politik khususnya dalam hak pilih.

Dalam pembukaan undang – undang Amerika Serikat, menyatakan bahwa kebebasan individu sangat dijunjung tinggi oleh para pendiri Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena pengalaman sejarah Amerika Serikat. Amerika Serikat dibawah koloni, dan untuk memperoleh kemerdekaannya bukanlah melalui proses yang singkat dan sederhana. Undang – undang di Amerika Serikat dirancang pada abad ke 18 untuk dapat memerintah 4 juta orang di 13 negara bagian yang berbeda di sepanjang pesisir Atlantik. Aturannya mudah dipahami, terdapat 27 amandemen yang sekarang bisa melayani kebutuhan lebih dari 260 juta warga Amerika di lebih dari 50 negara bagian. Tiga belas koloni Inggris di Amerika menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1776, setahun sebelumnya pecah sebuah perang kemerdekaan selama enam tahun (Oris, 2008: 13).

Masih dalam situasi perang, ketiga belas koloni ini membuat satu kesepakatan dalam *Articles of Confederation*, dimana didalamnya dibicarakan mengenai sebuah asosiasi yang longgar di antara negara – negara bagian dan menyusun sebuah pemerintahan federal dengan kekuasaan yang sangat terbatas (Kurtis, 2000:15). Akan tetapi peraturan ini tidak membawa Amerika dalam keadaan yang kondusif, maka pada Februari 1787, Kongres Kontinental,

yakni badan legislatif republik, menyerukan kepada setiap negara bagian untuk mengirimkan delegasi ke Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, untuk meninjau kembali pasal – pasal tentang Konfederasi dan perserikatan tersebut (Targonski, 1989:8).

Pembentuk dasar – dasar negara yang sering disebut sebagai bapak bangsa menyetujui tujuan utama yang tercantum dalam pembukaan Undang – undang Dasar.

“Kami rakyat Amerika Serikat, dengan maksud membentuk sebuah perserikatan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kedamaian domestik, mengadakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjaga anugerah kebebasan bagi diri dan para penerus kami, maka kami mengukuhkan dan menetapkan Undang – undang Dasar ini bagi Amerika Serikat”.

Pada awal perkembangannya hak pilih yang diakui adalah hanya hak pilih untuk laki – laki kelas menengah keatas dan hak wanita tidak diakui. Perkembangan yang terjadi di tahun 1800an , yaitu majunya pendidikan terhadap perempuan membuat era baru dalam perkembangan pengakuan hak pilih perempuan di Amerika Serikat.

Landasan Teori

Liberalisme

Amerika merupakan salah satu negara yang berlandaskan liberalisme. Internasionalisme Liberalisme sebagai salah satu studi dalam Hubungan Internasional yang mengedepankan kebebasan individu. Ciri – ciri dari sistem ekonomi Liberal adalah adanya kebebasan individu, produk filosofi dari Eropa, berpengaruh pada pembentukan masyarakat industri modern, kebebasan politik, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan individu, kesamaan di mata hukum, dasar dari globalisasi modern, percaya pada pasar bersistem kapitalis dan persaingan bebas, dengan cara untuk meraih kesejahteraan, peran negara adalah sebagai penengah konflik, dan penyedia pelayanan publik (Burchill & Linklater, 1996:55).

Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran liberalisme adalah Adam Smith. Banyak pemikiran dari Adam Smith yang diadopsi Amerika dalam perekonomiannya. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut mazhab klasik sebab gagasan – gagasan yang ditulisnya sebetulnya sudah banyaaak dibahas dan dibicarakan oleh pakar – pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya, soal paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani Kuno.

Adam Smith diberi julukan sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi” karena bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* yang ditulis tahun 1776 dianggap sebagai pancangan pertama

tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Pemikiran Smith sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang – barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran fisiokrat hanyalah penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan faktor kemakmuran negara. Kaum fisiokrat menganggap alamlah yang paling menentukan kemakmuran bangsa – bangsa. Sebaliknya, Smith menganggap manusia sebagai faktor produksi utama. Alasannya alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan (Deliarnov, 1995:29).

Salah satu karya Adam Smith adalah *The Wealth of Nations* yang terbit pada tahun 1776. Pemikiran Adam Smith adalah dia tidak mendorong kebijakan publik (seperti, peraturan yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu) tetapi ia lebih memilih agar masyarakat bekerja sesuai dengan yang menurut mereka menguntungkan, dia juga tidak mengklaim bahwa semua bisnis kepentingan pribadi memiliki keuntungan bagi masyarakat. Artinya, dia tidak mengatakan bahwa kepentingan pribadi selalu baik, tetapi dia menentang jika ada yang mengatakan bahwa kepentingan pribadi adalah buruk. Menurut Smith, tindak-tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self-interest*), bukan belas kasihan dan juga bukan perikemanusiaan.

Smith mendukung motto *Laissez faire-laissez passer* yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Pemerintah tidak terlalu campur tangan mengatur perekonomian, karena perekonomian akan berjalan dengan sendirinya. Nanti akan ada suatu tangan yang tak kentara (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna (*value in use*); kedua, nilai tukar (*value in exchange*). Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Untuk mengukur tenaga labor yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena ketrampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan “harga” *labor* sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Bagi Smith nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan sesuatu barang untuk memperoleh barang lain.

Menurut Smith produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi; orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing – masing. Adanya

spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri – sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan (diperdagangkan) di pasar (Deliarnov, 2006: 30).

Setiap orang bertindak untuk kepentingannya dan atas dasar keuntungan yang diperolehnya. Peningkatan kesejahteraan bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Untuk memperoleh keuntungan sebesar – besarnya dapat dilakukan dengan investasi , yaitu membeli mesin – mesin dan peralatan. Dengan mesin – mesin yang lebih canggih, maka produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produksi labor ini berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, maka pendapatan nasional akan meningkat. Dalam sistem liberal, tiap individu diberi keleluasaan yang besar untuk bertindak dalam perekonomian. Sistem liberal juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme karena menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi.

Pengaruh yang diberikan Smith terhadap perekonomian dunia sangat besar. Salah satunya adalah sistem ekonomi pasar yang sangat sederhana diterapkan dalam kehidupan. Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak mana pun. Serahkan saja semuanya kepada pasar, dan suatu invisible hand akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan, yang dalam posisi keseimbangan semua sumber daya dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila terdapat banyak campur tangan pemerintah, pasar justru mengalami distorsi, akan membawa perekonomian pada *inefficiency* dan ketidakseimbangan.

Demokrasi Liberal

Liberalisme dikembangkan sebagai perlawanan terhadap institusi mediasi yang hirarkis, yaitu monarki deotistik dengan kekuasaannya yang kuat terletak pada pernyataan bahwa mereka memperoleh dukungan ilahi. Liberalisme menyerang sistem yang lama dalam dua hal. Pertama, kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara dan menciptakan lingkungan masyarakat sipil dimana hubungan – hubungan sosial, termasuk urusan pribadi. Lembaga non negara , keluarga, dan kehidupan pribadi dapat berkembang tanpa campur tangan negara.

Secara gradual Liberalisme dihubungkan dengan doktrin yang menyatakan bahwa individu seharusnya bebas mengejar pilihannya sendiri dalam persoalan agama, ekonomi, dan politik semua yang pada kenyataannya mempengaruhi kehidupan mereka sehari – hari.

Sebuah elemen penting dalam hal ini adalah dukungan terhadap ekonomi pasar yang berdasarkan pada penghormatan terhadap kepemilikan pribadi. Elemen kedua dari liberalisme tempo dulu adalah klaim bahwa kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak-hak dasar dan hak – hak supranatural, melainkan pada kehendak masyarakat yang berdaulat. Akhirnya, klaim ini menyebabkan tuntutan akan demokrasi, yaitu penciptaan mekanisme perwakilan yang menjamin bahwa mereka yang memegang kekuasaan negara memperoleh dukungan rakyat.

Perkembangan mengenai demokrasi liberal telah dirangkum oleh, C.B.MacPherson dalam tiga model demokrasi yaitu demokrasi protektif, demokrasi pembangunan, dan demokrasi ekuilibrium. Model demokrasi liberal kuno, yang berasal dari tahun 1820an, dibangun atas sumbangan pemikiran Jeremy Bentham dan James Mill. MacPherson menyebutkan demokrasi protektif, karena keasyikan model tersebut dengan perlindungan terhadap warga negara dari pemerintah dan upayanya dalam memastikan bahwa gubernur akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan warga negara secara keseluruhan. Cara – cara perlindungan seperti ini dilihat sebagai hak suara yang bersifat universal. Suara tersebut memberikan kekuatan politik, satu orang satu suara menghasilkan perlindungan diri karena penguasa dapat dijatuhkan. Bentham dan Mill bersedia menerima pembatasan ketat atas hak memilih, kaum wanita dan sejumlah besar kelas pekerja tidak memperoleh hak istimewa itu. Alasan mereka lebih bersifat liberal daripada demokratis. Tujuannya adalah membatasi bidang politik, terutama bidang kegiatan dan lembaga pemerintah.

Perjuangan Pengakuan Hak Pilih Perempuan di Amerika Serikat

Pada bulan Mei 1787 diadakan konferensi Konstitusi yang dihadiri oleh 55 perwakilan dari 13 negara bagian kecuali Rhode Island, mereka telah memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Mereka adalah koloni Inggris yang berkumpul karena dua alasan penting. Pertama, cita – cita bersama mengenai kebebasan ekonomi pada tahun 1607, koloni Inggris pertama yang disebut sebagai Jamestown di Virginia. Kedua, adalah dikarenakan adanya keinginan bersama mengenai kebebasan bergama, hal ini berasal ketika tahun 1602, kapal *Mayflower* berlabuh di Massachusetts, membawa orang – orang Pilgrim dari Inggris. Mereka adalah pelarian dari kekuasaan gereja yang berlebihan di Inggris. Gereja menguasai hampir setiap kehidupan warga Inggris.

Deklarasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 4 Juli 1776, dimana dalam deklarasi tersebut termuat cita – cita bersama masyarakat Amerika Serikat yang telah dibuat oleh para

pendiri Amerika. Di dalamnya termuat mengenai hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya. Hal ini untuk menentang anggapan yang selama ini beredar dalam sistem monarki, dimana terdapat orang – orang yang mereka telah dipilih oleh Tuhan dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

John Locke memandang bahwa Tuhan telah memberikan manusia keistimewaan dari hewan yaitu hak yang telah ada di dalam diri manusia atau yang disebut sebagai *natural rights*, dimana tidak ada pembeda. Keberagaman bangsa Amerika juga merupakan tantangan dalam mencapai persatuan. Mereka diberi hak oleh Undang – undang Dasar abad ke-18 untuk memilih dan menguasai pemerintah pusat, mewakili asal usul, kepercayaan, dan kepentingan, yang berbeda – beda. Kebanyakan penduduk Amerika datang dari Inggris, tapi ada juga bangsa Swedia, Norwegia, Perancis, Belanda, Prusia, Polandia, dan banyak lainnya yang telah bermigrasi ke dunia baru “Amerika”.

Para pembuat Undang – undang Dasar menyadari bahwa dunia akan bergerak ke arah yang berbeda dari jaman dimana mereka hidup. Karenanya, mereka memasukkan ke dalam Undang – undang Dasar sebuah ketentuan untuk melakukan amandemen jika kondisi sosial, ekonomi, atau politik memintanya. Dua puluh tujuh amandemen telah dilalui sejak UUD tersebut diratifikasi dan kelenturannya terbukti sebagai salah satu kekuatan yang istimewa. Dengan adanya rancangan konstitusi Amerika pada tahun 1787, kekuasaan memerintah ada di tangan rakyat, bukan melalui keturunan seperti monarki atau kekuatan senjata, tetapi melalui pemilihan yang bebas dan terbuka oleh rakyat Amerika Serikat (<http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20231337>).

Secara teori hal ini sudah sangat jelas, akan tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian. Yang memperumit masalah sejak awal adalah syarat memilih : siapa yang boleh ikut memilih dan siapa yang tidak. Bagi para pendiri hanya orang – orang yang punya andil di masyarakat saja yang berhak memutuskan siapa yang memerintah. Mereka percaya bahwa karena pemerintah didirikan untuk melindungi hak milik dan kebebasan pribadi, maka hanya mereka yang mempunyai hak milik dan kebebasan sajalah yang boleh memilih. Ini berarti, pada waktu itu hanya golongan laki – laki kulit putih beragama protestan yang berhak memilih (Targonski, 1989:41).

Kaum wanita, orang miskin, pembantu, orang katolik, yahudi, budak dari Afrika, dan orang indian semuanya tidak berhak. “Kaum wanita, seperti halnya budak dan pembantu, statusnya ditentukan oleh ketergantungan mereka” kata sejarawan Michael Schudson. “Kewarganegaraan hanya berlaku buat mereka yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri”. Karena batasan – batasan ini, hanya sekitar 6 persen saja penduduk Amerika saat itu yang

akhirnya memilih George Washington menjadi presiden pertama pada 1789. Pada awalnya masyarakat Amerika bangga karena mereka dapat menghapuskan sistem kerajaan, akan tetapi seiring jalannya waktu sistem yang ada di negara ini hanya ditujukan untuk golongan atas. Hanya orang – orang kaya dan punya koneksi luas yang biasanya mampu merebut jabatan di dunia politik tanpa mendapat perlawanan yang berarti.

Dari masa kolonial, para wanita yang tidak menikah sudah menikmati hak – hak yang sama dengan pria, meskipun adat istiadat menghendaki mereka harus cepat menikah. Dengan ikatan perkawinan, para wanita kehilangan identitas mereka sendiri menurut hukum. Para wanita tidak memiliki hak pilih, dan pendidikan mereka di abad ke 17 dan 18, sebagian besar terbatas pada pelajaran membaca, menulis, musik, menari, dan jahit menjahit (Targonski, 1989:154).

Perubahan sosial yang terjadi pada perempuan di awal tahun 1800an, diikuti dengan pemikiran mengenai kesetaraan, dan mengakibatkan kelahiran gerakan untuk memperjuangkan hak pilih wanita. Sebagai contoh, perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan ikut tergabung ke dalam gerakan – gerakan reformasi, yang melibatkan mereka pada dunia politik. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan – pertanyaan dari kalangan perempuan mengapa mereka tidak diizinkan juga untuk memilih.

Kebangkitan kaum perempuan dimulai ketika Francis Wright, seorang pengajar dan wartawan Skotlandia, mengunjungi Amerika. Dia secara terbuka mendukung hak – hak wanita sepanjang Amerika Serikat selama tahun 1820an. Saat itu, wanita sering dilarang berbicara di tempat umum. Namun Wright juga tidak hanya berbicara lantang, ia juga mengejutkan banyak orang dengan pandangan – pandangan tentang hak – hak wanita mencari keterangan mengenai keluarga berencana dan perceraian. Pada tahun 1840-an, sekelompok wanita Amerika tampil membentuk gerakan pertama hak – hak perempuan. Yang terkemuka dalam kelompok istimewa ini adalah Elizabeth Cady Stanton.

Pada tahun 1848 Cady Stanton dan Lucretia Mott, juga seorang pembela hak – hak wanita, mengadakan suatu konvensi hak – hak wanita yang pertama dalam sejarah dunia di Seneca Falls, New York (<http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changed-the-outcome-of-the-election/>). Para delegasi tersebut membuat deklarasi yang menuntut persamaan dengan pria di mata hukum, hak untuk memilih, dan mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Di tahun yang sama, Ernestine Rose, seorang imigran asal Polandia, berperan penting dalam meloloskan undang – undang di negara bagian New York yang mengizinkan wanita yang sudah menikah memiliki properti

atas nama mereka sendiri. Salah satu UU pertama jenis ini di Amerika, Undang – undang properti wanita menikah, memacu para dewan legislatif di negara bagian lain untuk memberlakukan undang – undang yang serupa.

Konvensi yang diadakan pada tanggal 19 sampai 20 Juli 1848 di Seneca Falls New York ini kemudian diikuti berangsur – angsur oleh gerakan wanita lainnya (<http://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/Womens-Rights/>). Hampir 100 orang menghadiri konvensi tersebut. Pada konvensi ini di kritik mengenai pembukaan Undang – undang dimana wanita dan laki – laki dibuat sama derajatnya. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian. Pada tahun 1850 mereka berjuang dalam hal kebebasan ekonomi. Kemudian mereka tidak berhasil mendesak kongres untuk mencantumkan hak pilih untuk wanita dalam amandemen keempat belas dan lima belas mengenai hak warga negara dan kebebasan hak suara.

Pada gelombang *civil war*, mereka berusaha agar isu yang dibawa tidak terlalu marginal. Perang sipil terjadi pada tahun 1861 – 1865) akibat adanya perbudakan, tiga amandemen Konstitusi Amerika Serikat berubah secara signifikan cakupan dan sifat demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas diratifikasi pada tahun 1865, menghapus perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan di Amerika adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal, dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan perlindungan hukum yang adil harus ditegakkan oleh pemerintah federal (<http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changed-the-outcome-of-the-election/>).

Amandemen kelima belas, diratifikasi pada tahun 1870, melarang pemerintah federal atau pemerintah negara bagian melakukan diskriminasi terhadap calon pemilih berdasarkan ras, warna kulit, atau status terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin tidak disebutkan di dalam amandemen tersebut. Oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang memberikan suara. Perluasan hak pilih yang memperbolehkan mantan budak untuk ikut pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan suara. Dan mereka membuat NWSA untuk memperjuangkan hak pilih wanita yang tidak dibahas di dalam amandemen yang kelima belas.

Lucy Stone, seorang aktivis pembela perempuan membuat sebuah asosiasi yang bernama *American Woman Suffrage Association* (AWSA), dan menolak rancangan yang diajukan oleh NWSA karena dianggap terlalu rasial (<http://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/Womens-Rights/>). Walaupun di tingkat

senat, Aaron Sargen telah mengenalkan adanya rancangan amandemen mengenai hak pilih wanita, akan tetapi bentuk nyata dari amandemen tersebut belum terwujud. Pada kurun waktu tahun 1800an, terjadi persaingan antara NWSA dan AWSA, dimana kumpulan dana yang dimiliki oleh AWSA lebih banyak akan tetapi hanya pada lingkup negara bagian. NWSA yang memiliki pusat di New York lebih menekankan perjuangan yang meluas dimana meminta dukungan dari para pemilih dan laki – laki untuk mendukung perjuangan mereka.

Titik balik terjadi pada tahun 1880 dan 1890, kedua asosiasi AWSA dan NWSA bergabung menjadi satu bernama *National American Woman Suffrage Association* (NAWSA). Dipimpin oleh Stanton dan Anthony. NAWSA mulai membentuk gerakan lain dibawahnya seperti *Women's Trade Union League*, *the Woman's Christian Temperance Union* (WCTU), *and the National Consumer's League*. Selama dua dekade berikutnya, NAWSA bergerak sebagai organisasi non partisan yang difokuskan pada mendapatkan suara dalam serikat, meskipun masih terdapat beberapa persoalan didalamnya ada keberhasilan yang diraih oleh organisasi ini. Pada tahun 1869 negara bagian pertama yang mengakui hak pilih wanita adalah Wyoming. Tiga negara berikutnya adalah Colorado pada tahun 1893, Utah pada tahun 1896, dan Idaho pada tahun 1896. Pada rentan tahun 1910 dan 1914 terdapat empat negara bagian yang melegalkan hak pilih wanita dalam pemilihan umum. Keempat negara tersebut adalah Washington, California, Arizona, Kansas, dan Oregon.

Pada tahun 1913, Alice Paul, seorang aktivis muda yang memiliki pengalaman dalam gerakan hak pilih membentuk *National Woman Party* sebagai bentuk saingan dari *Congressional Union* (Dahl, 2000:89). Paul lebih menekankan lebih militan dengan lebih banyak mengajak masa pendukung dan menekan pemerintah Woodrow Wilson untuk mengamandemen undang – undang mengenai hak pilih wanita. Pada tahun 1917, Presiden Wilson mendesak kongres untuk meloloskan amandemen hak suara. Prestasi juga diperoleh pada tahun itu dimana Jeanetta Rankin diangkat sebagai wanita pertama yang melayani di tingkat legislatif nasional. Paul mengadakan kampanye untuk menyuarakan agar adanya hak pilih wanita dalam amandemen. Hal ini masih mengalami kegagalan (Dahl, 2000: 90).

Perang sipil terjadi pada tahun 1861 – 1865) akibat adanya perbudakan, tiga amandemen Konstitusi Amerika Serikat berubah secara signifikan cakupan dan sifat demokrasi Amerika. Amandemen ke tigabelas diratifikasi pada tahun 1865, menghapus perbudakan. Amandemen ke empat belas, yang disahkan pada tahun 1868, menyatakan bahwa semua orang yang lahir atau dinaturalisasikan di Amerika adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian dimana dia tinggal, dan hak hidup, kemerdekaan, kepemilikan, dan perlindungan hukum yang adil harus ditegakkan oleh pemerintah federal.

Amandemen kelima belas, diratifikasi pada tahun 1870, melarang pemerintah federal atau pemerintah negara bagian melakukan diskriminasi terhadap calon pemilih berdasarkan ras, warna kulit, atau status terdahulunya sebagai budak. Jenis kelamin tidak disebutkan di dalam amandemen tersebut. Oleh karena itu, kaum wanita tetap dilarang memberikan suara. Perluasan hak pilih yang memperbolehkan mantan budak untuk ikut pemilu memberikan nafas baru bagi kampanye gerakan kaum wanita untuk ikut memberikan suara. Pada tanggal 10 Januari 1918 *House of Representative* meloloskan adanya amandemen mengenai hak pilih wanita, akan tetapi tidak diloloskan oleh Kongres. Dua tahun kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1920, amandemen kesembilan belas mengenai hak pilih penuh wanita dalam pemilihan umum (Targonski, 1989:127).

Penutup

Konstitusi Amerika Serikat adalah sebuah konstitusi tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Didalam konstitusi tersebut terdapat sebuah Undang – undang Dasar, dimana para pendiri bangsa telah meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu undang – undang dasar ini harus dibuat secara fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan waktu, oleh karena itu para pendiri bangsa mengatur sebuah tata cara dimana peraturan yang ada di dalam undang – undang dapat di amandemen.

Ketiga belas negara bekas koloni membuat kesepakatan untuk membuat suatu negara dimana bebas dari pengaruh monarki dan menjunjung tinggi adanya kebebasan individu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedemikian mulus. Masih terdapat penyimpangan seperti penindasan terhadap budak, tidak meratanya hak pilih yang ada di dalam masyarakat. Seperti halnya perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Negara ini yang mengaku menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Pada awal pemilihan umum, yang diakui hak suaranya adalah laki – laki dari kulit putih yang memiliki kekayaan yang melimpah. Para pendiri bangsa pada mulanya beranggapan bahwa yang seharusnya diakui hak pilihnya adalah mereka yang dapat memerdekakan dirinya sendiri. Wanita dalam hal ini tidak diakui, karena mereka beranggapan bahwa wanita sama halnya seperti budak memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini yang menjadikan para wanita melakukan gerakan dimana mereka menuntut agar hak mereka diakui, dan perjuangan ini membuahkan hasil tidak hanya dalam sejarah demokrasi di Amerika, namun juga di dunia. Bahwa tidak ada pembeda jenis kelamin terhadap hak pilih di pemilihan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Alston J.Lee dan Joseph P. Ferie. 1999. *Southern Paternalism and The American Welfare State: Economics, Politics, and Institutions in the South, 1865–1965*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dahl, A. Robert. 2000. *How Democratic is the American Constitution*. London: Yale University Press.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafiando
- Deliarnov. 2006. *Mencakup Berbagai Teori dan Konsep Komprehensif Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Erlangga
- Rosalie, Targonski. 1989. (terj.) *Garis – garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat; Amerika Serikat: Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat*.
- Kurtis, Michel Kent. 2000. *Free Speech , The People Darling Privilage Struggles for Freedom of Expression in American History*. Duke University Press.
- Stephen H.Oris. 2008. *American Constitutional Law: Civil Rights and Liberties; volume II, Fourth edision; Thompson Wordswoth*.

Internet:

<http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changed-the-outcome-of-the-election/>

http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/gender-gap-2012-election-obama_n_2086004.html

<http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/07/womens-vote-obama-victory-election>

<http://www.americanprogress.org/issues/women/report/2012/12/12/47916/how-women-changed-the-outcome-of-the-election/>

<http://history.house.gov/Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-Essays/No-Lady/Womens-Rights/>

<http://www.archives.gov/historicaldocs/document.html?doc=13&title.raw=19th%20Amendment%20to%20the%20U.S.%20Constitution:%20Women's%20Right%20to%20Vote>